

Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Kemandirian Daerah, Penerimaan dari Pemerintah Pusat dan Ukuran Legislatif terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018/2020)

Anggi Kusuma Wardani¹, Kurnia Rina Ariani²

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia

²Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia

anggikusuma.wrdn@gmail.com

Keywords:

Size of Local Government, Regional Independence, Revenue from the Central Government, Legislative Size, Local Government Financial Reports

Abstract: *The purpose of this study is to analyze the size of the local government, regional independence, revenue from the central government and the size of the legislature on the level of disclosure of local government financial statements in the district/city government of Central Java province in 2018-2020. The sample used in this study is the Regency/City of Central Java Province in 2018-2020. The sampling method is by purposive sampling. The number of samples collected is 105 districts/cities samples. The analytical method used is multiple linear regression analysis. The results of the study provide empirical evidence that the size of the local government has no effect on the level of disclosure of local government financial statements, regional independence has no effect on the level of disclosure of local government financial statements, the size of the legislature has no effect on the level of disclosure of regional financial statements, receipts from the central government have no effect on the level of disclosure of regional financial statements. Disclosure of local government financial statements, and the size of the legislature affect the level of disclosure of local government financial statements.*

Kata Kunci:

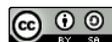
Ukuran Pemerintah Daerah, Kemandirian Daerah, Penerimaan dari Pemerintah Pusat, Ukuran Legislatif, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Abstrak: Tujuan penelitian ini menganalisis ukuran pemerintah daerah, kemandirian daerah, penerimaan dari pemerintah pusat dan ukuran legislatif terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah pada pemerintah daerah kabupaten/kota provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2020. Sampel yang digunakan digunakan dalam penelitian ini adalah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2018-2020. Metode pengambilan sampel dengan cara purposive sampling. Jumlah sampel yang terkumpul sebanyak 105 sampel Kabupaten/Kota. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian memberikan bukti empiris bahwa ukuran pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah, kemandirian daerah tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah, ukuran legislatif tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan daerah, penerimaan dari pemerintah pusat tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah, dan ukuran legislatif berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah.

Article History:

Received: 13-07-2022

Online : 04-08-2022



This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



A. LATAR BELAKANG

Good governance merupakan suatu gagasan dan nilai yang secara otonomi mengatur, mengelola dan mempertanggung jawabkan administrasi publik saat ini dan memiliki keterkaitan dengan bagaimana suatu pemerintahan dapat menjalankan tugas dan fungsinya (Maulana & Dwi Handayani, 2015). *Good governance* memiliki keterkaitan dengan bagaimana pemerintah mampu mencapai otonomi di suatu daerah. Laporan keuangan merupakan bentuk yang konkrit dalam upaya *good governance*, serta untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan publik, pemerintah pusat maupun daerah sebagai bentuk pertanggung jawaban UU tentang Kewenangan Daerah No. 23 Tahun 2014, yang mana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015 menetapkan bahwa setiap pemerintah, provinsi, kabupaten, dan kota wajib menyusun laporan pertanggung jawabannya sendiri.

Penyelenggaraan urusan desentralisasi terdiri dari dua urusan, yaitu: urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib merupakan urusan yang sangat mendasar yang harus dilakukan oleh pemerintah karena memiliki kaitan dengan hak dasar dan pelayanan dasar warga negara. Sedangkan urusan pilihan merupakan urusan menyesuaikan suatu daerah tersebut dalam pelaksanaannya berdasarkan potensi suatu daerah dan kondisinya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tersebut. Dengan demikian, isi dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) tiap Kabupaten/Kota akan memiliki perbedaan karena sangat tergantung dengan urusan yang menjadi tanggung jawabnya dan karakteristik dari masing-masing Pemerintah Daerah tersebut (Mustikarini & Fitriarsari, 2012).

Ukuran pemerintah daerah adalah salah satu variabel dalam besar atau kecilnya pemerintahan suatu daerah yang dapat diukur dengan total aset, jumlah pegawai, total pendapatan dan tingkat produktivitas. Ukuran pemerintah dapat diproksikan sebagai total aset yang dimiliki daerah tersebut dan memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Dengan ukuran pemerintah daerah yang besar, dan pemerintah daerah yang mampu memanfaatkan sumber - sumber 3 potensi daerahnya serta dapat mengelola dengan baik seluruh potensi daerah maka secara tidak langsung pendapatan asli daerah juga dipastikan akan meningkat (Mulyani & Wibowo, 2017).

Pendanaan pemerintah daerah untuk mengelola daerahnya sendiri diperoleh dari PAD dan pendapatan transfer. Daerah dikatakan mandiri jika penggunaan PAD dalam pembangunan daerah lebih besar dibandingkan dengan penggunaan dana transfer (Jatmiko, 2016). PAD diperoleh dari pajak maupun retribusi daerah yang dibayarkan ke pemerintah untuk menambah kekayaan daerah atau negara dan digunakan sebagai sumber pembiayaan daerah. Dana transfer dari pemerintah pusat diakui sebagai pendapatan karena merupakan sumber pendanaan pemerintah daerah. Penerimaan pendapatan transfer dalam jumlah yang besar adalah dana alokasi umum (DAU). kemandirian daerah dapat disimpulkan sebagai rasio keuangan pemerintah yang diukur berdasarkan perbandingan antara realisasi pendapatan dengan DAU ditambah pinjaman, namun Utang Pajak Pusat (UPP) dan utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dikeluarkan karena bukan merupakan sumber pendapatan (Hadi, 2017), sehingga daerah secara mandiri akan selalu berusaha untuk meningkatkan akuntabilitas agar mendapat kepercayaan publik.

Selanjutnya, hasil laporan keuangan pemerintah yang telah dibuat harus mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang berlaku, kemudian disampaikan kepada DPR/DPRD dan masyarakat umum setelah ditinjau oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Laporan Keuangan merupakan suatu bentuk mekanisme pertanggung jawaban sekaligus dasar untuk pengambilan keputusan bagi pihak eksternal maka laporan keuangan yang ditinjau harus dilampiri dengan

pengungkapan. Pengungkapan dalam suatu laporan keuangan dibagi menjadi dua antara lain: pengungkapan wajib (*Mandatory Disclosure*) dan pengungkapan sukarela (*Voluntary Disclosure*) (Suhardjanto & Yulianingtyas, 2011).

Penerapan good governance yang berhubungan dengan tingkat pengungkapan tidak bisa dipisahkan dari *agency theory* dan *stewardship theory* (Daniri, 2005). Jika didalam teori agensi menjelaskan hubungan antara principal dan agen maka didalam teori stewardship dijelaskan hubungan antara principal (pemberi amanah) dan steward (penerima amanah). *Theory stewardship* adalah teori yang mendeskripsikan keadaan dimana para manajer tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan pribadi sebagaimana materi dan uang tetapi lebih ditunjukkan kepada target hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi (Raharjo, 2007). *Theory stewardship* mempunyai akar psikologi dan sosiologi yang dirancang untuk menjelaskan keadaan dimana manajer sebagai steward dan bertindak sesuai kepentingan pemilik (Davis, Schoorman, & Donaldson, 1997). Steward tidak akan meninggalkan organisasinya sebab steward berusaha untuk mencapai tujuan sasaran organisasinya. Dengan kata lain hubungan yang terjadi antara principal dan steward, dalam kondisi ini hubungan rakyat dan pemerintah terjalin karena adanya sifat dasar manusia yang dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab, memiliki integritas, dan kejujuran kepada pihak lain (Sari, 2013). Masyarakat yakin bahwasanya pemerintah yang mereka pilih akan berkewajiban memenuhi hak mereka dan bertindak sesuai dengan kewajibannya yang berpedoman pada peraturan daerah yang relevan. Adapun hipotesis dalam penelitian ini yang akan di uji adalah:

1. Pengaruh antara Ukuran Pemerintah Daerah terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah

Ukuran pemerintah daerah dalam penelitian ini akan diproksikan dengan total aset yang merupakan sumber daya yang digunakan untuk melakukan kegiatan operasional suatu entitas. (Uliarta et al., 2018) menyatakan aset menunjukkan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dimasa depan diharapkan dapat diperoleh. Semakin besar total aset, maka semakin besar pula ukuran pemerintahan tersebut. Ukuran pemerintahan yang besar akan mendorong pemerintahan daerah tersebut untuk mengungkapkan informasi keuangan secara lengkap, selain itu ukuran pemerintah yang besar biasanya akan semakin dikenal oleh publik dan memiliki pengelolaan keuangan yang kompleks sehingga pemerintah akan mendapatkan pengawasan yang lebih ekstra terkait transparansi dan akuntabilitas.

H1 : Ukuran pemerintah daerah berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah.

2. Pengaruh antara kemandirian daerah terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah.

Kemandirian daerah menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah melunasi pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang dibutuhkan daerah. Kemandirian suatu daerah dapat dilihat dari perbandingan antara pendapatan asli daerah dan total pendapatan daerah (Imawan & Wahyudin, 2014).

Semakin tinggi pendapatan asli daerah maka semakin tinggi rasio kemandirian, besarnya pendapatan asli daerah menunjukkan semakin tingginya kontribusi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi. Hal ini mengakibatkan meningkatnya tuntutan terhadap pemerintah daerah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Transparansi dan

akuntabilitas bisa dicapai salah satunya dengan laporan keuangan pemerintah daerah. Semakin tinggi kemandirian daerah, maka semakin besar tuntutan bagi pemerintah daerah dalam melaporkan pengungkapan didalam laporan keuangan pemerintah daerah.

H2: Kemandirian daerah berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah.

3. Pengaruh antara penerimaan dari pemerintah pusat terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten di Prvinsi Jawa Tengah.

Suatu pemerintahan dengan penerimaan dari pemerintah pusat yang besar menunjukkan bahwasanya pemda tersebut memiliki taraf ketergantungan keuangan terhadap pemerintahan pusat dalam mendanai kegiatan yang dijalankan oleh pemerintah daerah. Hal ini mengakibatkan pemerintah pusat meminta penyajian lebih sebagai cara mengawasi kinerja pemerintah daerah dalam pemakaian dana tersebut, sehingga pemerintah daerah akan terdorong untuk menaikkan transparansi keuangan yang didapat dalam rangka mewujudkan kepercayaan pemerintah pusat dan masyarakat, serta menunjukkan ketaatan atas peraturan yang berlaku. (Ratnasari, 2016), dalam studinya menemukan korelasi positif terhadap tingkat penyajian, alhasil besarnya taraf ketergantungan akan diikuti dengan semakin besarnya taraf penyajian yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

H3: Penerimaan dari pemerintah pusat berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah.

4. Pengaruh antara ukuran legislatif terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah Lembaga yang mewakili rakyat. DPRD bertugas mengawasi pemerintah daerah agar dapat mengelola anggaran yang ada untuk dapat digunakan dengan sebaik-baiknya. (Suhardjanto & Yulianingtyas, 2011), menyatakan bahwa lembaga yang memiliki potensi dan peran strategis dalam pengawasan keuangan daerah merupakan lembaga legislatif atau DPRD. Penelitian (Setyaningrum & Syafitri, 2012), menunjukkan bahwasanya jumlah anggota legislatif atau DPRD berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan, hal ini menunjukkan peranan DPRD dalam pengawasan keuangan berjalan baik sehingga dapat mengontrol kebijakan keuangan daerah secara efisien, ekonomis, efektif, transparan dan akuntabel. Semakin banyak jumlah anggota legislatif diharapkan dapat meningkatkan pengawasan terhadap pemerintah daerah, sehingga dapat mendorong pemerintah daerah untuk melakukan pengungkapan yang lebih besar.

H4: Ukuran Legislatif berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan lapran keuangan pemerintah daerah.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kausalitas dan mengacu pada pendekatan kuantitatif. Melihat adanya hubungan serta adanya pengaruh variabel X dengan variabel Y perlu digunakan pendekatan kausalitas. Penelitian ini mengkaji ada atau tidaknya hubungan antara ukuran pemerintah daerah, kemandiria daerah, penerimaan dari pemerintah pusat dan ukuran legislatif sebagai variabel independen dengan tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah sebagai variabel dependen pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun anggaran 2018 – 2020.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Deskripsi Objek Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh ukuran pemerintah daerah, kemandirian daerah, penerimaan dari pemerintah pusat, dan ukuran legislatif terhadap pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah di Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah tahun 2018-2020.

Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan hasil pemeriksaan BPK pada tahun 2018-2020. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah pada tahun 2018-2020. Berdasarkan metode *purposive sampling*, maka jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 35 Kabupaten/kota se-Jawa.

Tabel 1. Data Sampel Penelitian

NO	Keterangan	Jumlah
1	Pemerintah Daerah meliputi Kabupaten/ Kota yang berada di Jawa Tengah	35
2	Pemerintah Daerah meliputi Kabupaten/Kota yang mempublikasikan Laporan keuangan berturut-turut tahun 2014-2017	
3	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota yang Telah Diaudit.	(0)
4	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota yang menyajikan data secara lengkap	(0)
Jumlah Perusahaan Sampel		35
Jumlah Sampel (35 x 3 Tahun)		105
Data Outlier		2
Data diolah		103

Sumber: Data primer olah, 2022

2. Uji Asumsi Klasik

a. Hasil Uji Normalitas Data

Uji normalitas data dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui apakah data dari masing-masing variabel memiliki distribusi normal. Model regresi yang baik adalah yang mempunyai distribusi data normal atau mendekati normal. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan uji *One Kolmogorov-Smirnov* dalam melakukan uji normalitas data. Hasil uji normalitas dapat dilihat pada table IV.2.

Tabel 2. Hasil Uji Normalitas Data

	Unstandardized Residual
Kolmogorov-Smirnov Z	0,069
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,200
Keterangan	Normal

Sumber: Data Hasil Olah, 2021

Dari data diatas diketahui bahwa nilai signifikan atau *probability* 0,200. Dimana nilai tersebut lebih besar dari 0,05 maka data penelitian tersebut berdistribusi normal.

b. Hasil Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinearitas dalam model regresi berganda dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan *Variance Inflation factor* (VIF). Jika nilai *tolerance* di atas 0,1 dan VIF di bawah 10 maka model Multikolinearitas (Ghozali 2011:105). Hasil uji multikolinearitas dapat dilihat pada tabel IV.3.

Tabel 3. Tabel Hasil Uji Multikolinearitas Data

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
Ukuran Pemerintah Daerah	0,671	1,490	Bebas Multikolinearitas
Kemandirian Daerah	0,704	1,421	Bebas Multikolinearitas
Penerimaan dari Pemerintah Pusat	0,546	1,831	Bebas Multikolinearitas
Ukuran Legislatif	0,507	1,970	Bebas Multikolinearitas

Sumber: Hasil olah data, 2022

Hasil uji multikolinearitas pada model penelitian di atas menunjukkan bahwa seluruh variabel independen memiliki nilai VIF kurang dari 10 dan nilai *tolerance* > 0,1 sehingga dapat disimpulkan bahwa model tidak terjadi multikolinearitas.

c. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas (Ghozali, 2011:139). Dalam penelitian ini pengujian heteroskedastisitas dilakukan dengan uji *Rank Spearman-Rho*. Uji *Rank Spearman-Rho* dilakukan dengan meregresi variabel-variabel bebas dalam persamaan regresi dengan nilai residual sebagai variabel terikatnya. Uji *Rank Spearman-Rho* dapat ditunjukkan dalam table IV.4.

Tabel 4. Hasil Uji Heterokedastisitas

Variabel	<i>p-value</i>	Keterangan
Ukuran Pemerintah Daerah	0,687	Bebas Heterokedastisitas
Kemandirian Daerah	0,403	Bebas Heterokedastisitas
Penerimaan dari Pemerintah Pusat	0,731	Bebas Heterokedastisitas
Ukuran Legislatif	0,245	Bebas Heterokedastisitas

Sumber: Hasil olah data, 2022

Berdasarkan hasil yang ditunjukkan dalam tabel IV.4 tersebut nampak bahwa semua variabel bebas menunjukkan nilai *p value* > 0,05 (Ghozali, 2011:142-143). Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada heteroskedastisitas dalam persamaan regresi dan model regresi tersebut layak digunakan dalam penelitian ini.

d. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi adalah untuk menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan residual pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Pada pengujian autokorelasi, peneliti menggunakan run test yang merupakan salah satu pengujian untuk menguji ada atau tidaknya autokorelasi pada suatu model regresi. Hasil pengujian ini dapat dilihat dari signifikansi uji run test, dimana jika hasil signifikansi $> 0,05$ maka dinyatakan tidak terjadi autokorelasi, sebaliknya apabila nilai signifikansi $< 0,05$ maka terjadi autokorelasi pada suatu model regresi (Ghozali, 2011). Hasil uji autokorelasi dapat dilihat pada tabel IV. 5.

Tabel 5. Hasil uji autokorelasi

DW	DL	Du	Keterangan
2,220	1,5993	1,7603	Tidak terjadi Autokorelasi

Sumber: Data sekunder diolah, 2022

Berdasarkan hasil pengujian tabel IV.5 menunjukkan bahwa nilai Durbin-Watson sebesar 2,220. Untuk nilai d_U dan d_L dapat dilihat dari DW tabel pada signifikansi 0,05 dengan n (jumlah data) = 103 dan k (jumlah variabel independen) = 4 didapatkan nilai d_L adalah 1,5993 dan nilai d_U adalah 1,7603, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada autokorelasi.

3. Hasil Analisis Regresi

Adapun hasil analisis data yang diperoleh dengan program SPSS 21 dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh ukuran pemerintah daerah, kemandirian daerah, penerimaan dari pemerintah pusat, dan ukuran legislatif terhadap laporan keuangan pemerintah daerah di Kabupaten/Kota di Jawa Tengah tahun 2018-2020. Hasil analisis regresi linear berganda dapat dilihat pada table IV.6.

Tabel 6. Hasil Uji Regresi Berganda

Variabel	Koefisien Regresi	T_{hitung}	<i>Sig</i>	Ket
<i>Constanta</i>	0,386	9,243	0,000	
Ukuran Pemerintah Daerah	-0,00000000000000001987	-1,016	0,312	H1 diterima
Kemandirian Daerah	-0,031	-0,442	0,659	H2 diterima
Penerimaan dari Pemerintah Pusat	0,00000000000000001111	0,0498	0,620	H3 ditolak
Ukuran Legislatif	0,003	2,810	0,006	H4 diterima
$R^2 = 0,120$		$F_{hitung} =$	3,356	
Adjusted $R^2 = 0,085$		$Sig =$	0,013	

Sumber: Hasil olah data, 2021

Model dari penelitian ini adalah:

$$\text{LKPD} = 0,386 + 0,000000000000001987 \text{ UPD} - 0,031 \text{ KEM} + 0,000000000000001111 \text{ PEN} + 0,003 \text{ UKL} + \varepsilon$$

Untuk menginterpretasikan hasil dari analisis tersebut, dapat diterangkan:

- a. Nilai konstanta sebesar 0,386 menunjukkan bahwa jika variabel ukuran pemerintah daerah, kemandirian daerah, penerimaan dari pemerintah pusat, dan ukuran legislatif diasumsikan konstan atau sama dengan nol maka pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah akan meningkat.
- b. Dari hasil uji hipotesis menunjukkan besarnya koefisien regresi variabel ukuran pemerintah daerah bernilai negatif sebesar -0,000000000000001987.. Artinya apabila semakin meningkat ukuran pemerintah daerah maka pengungkapan laporan keuangan daerah akan menurun. Sebaliknya apabila semakin menurun ukuran pemerintah daerah maka pengungkapan laporan keuangan daerah akan meningkat.
- c. Dari hasil uji hipotesis menunjukkan besarnya koefisien regresi variable kemandirian daerah bernilai negatif sebesar -0,031. Artinya apabila semakin meningkat kemandirian daerah maka pengungkapan laporan keuangan daerah akan menurun. Sebaliknya apabila semakin menurun kemandirian daerah maka pengungkapan laporan keuangan daerah akan meningkatnya.
- d. Dari hasil uji hipotesis menunjukkan besarnya koefisien regresi variabel penerimaan dari pemerintah pusat bernilai negatif sebesar -0,000000000000001111. Artinya apabila semakin meningkat penerimaan dari pemerintah pusat maka pengungkapan laporan keuangan daerah akan menurun. Sebaliknya apabila semakin menurun penerimaan dari pemerintah daerah maka pengungkapan laporan keuangan daerah akan meningkat
- e. Dari hasil uji hipotesis menunjukkan besarnya koefisien regresi variabel ukuran legislatif bernilai positif sebesar +0,003. Artinya apabila semakin meningkat ukuran legislatif maka pengungkapan laporan keuangan daerah juga akan meningkat. Begitu pula sebaliknya apabila semakin menurun ukuran legislatif maka pengungkapan laporan keuangan daerah juga akan menurun.

4. Hasil Uji Hipotesis

Setelah melakukan pengujian asumsi klasik dan hasilnya secara keseluruhan menunjukkan model regresi yang memenuhi asumsi klasik, maka tahap selanjutnya adalah melakukan evaluasi dan interpretasi model regresi linier berganda.

a. Uji Fit Model (Uji F)

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama - sama terhadap variabel dependen atau terikat (Ghozali, 2011:98). Berdasarkan hasil pengolahan data diperoleh data sebagai berikut: Untuk variabel belanja modal didapatkan hasil nilai F_{hitung} (3,356) dengan nilai $p-value = 0,013$ sedangkan F_{tabel} (2,46) dengan ketentuan $\alpha = 5\%$, $df_1 = k-1$ atau $5-1 = 4$, dan $df_2 = n-k$ atau $103-4=99$. Hasil uji dari distribusi F_{hitung} (3,356) lebih besar dari F_{tabel} (2,46) dengan bahwa nilai $p-value = 0,013$ dengan ketentuan $\alpha = 5\%$, . Hasil uji dari $p-value$ (0,000) < 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel independen yang terdiri dari ukuran pemerintah daerah, kemandirian daerah, penerimaan dari pemerintah pusat, dan ukuran legislatif terhadap laporan keuangan

pemerintah daerah secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah.

b. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien Determinasi (R^2) digunakan untuk melihat seberapa besar variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen. Apabila angka koefisien determinasi mendekati 1, maka pengaruh variabel independen terhadap variabel independen semakin kuat. Hal ini berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Sedangkan nilai koefisien determinasi (R^2) yang kecil variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen adalah terbatas (Ghozali, 2011:177).

Koefisien Determinasi (R^2) digunakan untuk menguji *goodness-fit* dari model regresi (Ghozali, 2011:177). Serta hasil perhitungan untuk nilai adjusted R^2 dengan bantuan program spss, dalam analisis regresi berganda diperoleh angka koefisien determinasi atau *adjusted* R^2 sebesar 0,085. Hal ini berarti bahwa 8,50% variasi pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah yang dijelaskan oleh variabel dari ukuran pemerintah daerah, kemandirian daerah, penerimaan dari pemerintah pusat, dan ukuran legislatif terhadap laporan keuangan pemerintah daerah. Sementara sisanya 91,50% diterangkan oleh variabel lain yang tidak masuk dalam observasi penelitian ini. Maka dapat disimpulkan bahwa, dari hasil uji tersebut menunjukkan bahwa model penelitian *goodness-fit*. Hasil dapat dilihat pada lampiran. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh ukuran pemerintah daerah, kemandirian daerah, penerimaan dari pemerintah pusat, dan ukuran legislatif terhadap laporan keuangan pemerintah daerah terhadap pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah di Kabupaten/Kota Jawa Tengah tahun 2018-2020, dapat ditarik pembahasan:

- a. Nilai t hitung untuk variabel ukuran pemerintah daerah sebesar $-1,016 < -1,98326$ dan nilai signifikan sebesar $0,312 > 5\%$, sehingga **H_1 ditolak** yang artinya ukuran pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keuangan daerah.
- b. Nilai t hitung untuk variabel kemandirian daerah sebesar $-0,442 < -1,98326$ dan nilai signifikan sebesar $0,659 > 5\%$, sehingga **H_2 ditolak** yang artinya kemandirian daerah tidak berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keuangan daerah.
- c. Nilai t hitung untuk variabel penerimaan dari pemerintah pusat sebesar $-0,498 < -1,98326$ dan nilai signifikan sebesar $0,620 > 5\%$, sehingga **H_3 ditolak** yang artinya penerimaan dari pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keuangan daerah.
- d. Nilai t hitung untuk variabel ukuran legislatif sebesar $2,810 > 1,98326$ dan nilai signifikan sebesar $0,006 < 5\%$, sehingga **H_4 diterima** yang artinya ukuran legislatif berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keuangan daerah.
- e. Hasil perhitungan untuk nilai analisis regresi berganda diperoleh angka koefisien determinasi atau *adjusted* R^2 sebesar 0,085. Hal ini berarti bahwa 8,50% variasi pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah yang dijelaskan oleh variabel dari ukuran pemerintah daerah, kemandirian daerah, penerimaan dari pemerintah pusat, dan ukuran legislatif terhadap laporan keuangan pemerintah daerah. Sementara sisanya 91,50% diterangkan oleh variabel lain yang tidak masuk dalam observasi penelitian ini.

D. SIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel ukuran pemerintah daerah, kemandirian dan penerimaan dari pemerintah pusat tidak berpengaruh terhadap tingkat laporan keuangan pemerintah daerah. Sedangkan, ukuran legislatif berpengaruh terhadap tingkat laporan keuangan pemerintah daerah. Berikut adalah saran yang diberikan oleh peneliti: (1) Penelitian selanjutnya disarankan untuk memasukan atau menambah variabel-variabel baru yang diidentifikasi sebagai komponen yang dapat mempengaruhi sisa lebih penerimaan anggaran; dan (2) Peneliti selanjutnya juga diharapkan dapat menambah jumlah sampel penelitian dimana hal ini akan menambah kualitas penelitian yang akan dilakukan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih penulis ucapkan kepada Universitas Muhammadiyah Surakarta dan pihak-pihak terkait yang telah memfasilitasi dan membantu berjalannya penelitian ini.

REFERENSI

- Imawan, R., & Wahyudin, A. (2014). Analisis Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2010-2012. *Accounting Analysis Journal*, 3(2). <https://doi.org/10.15294/AAJ.V3I2.4176>
- Maulana, C., & Dwi Handayani, B. (2015). Pengaruh Karakteristik, Kompleksitas Pemerintahan Dan Temuan Audit Terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib LKPD. *Accounting Analysis Journal*, 4(4). <https://doi.org/10.15294/AAJ.V4I4.9107>
- Mustikarini, W. A., & Fitriyani, D. (2012). Pengaruh karakteristik pemerintah daerah dan temuan audit BPK terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia tahun anggaran 2007. *Simposium Nasional Akuntansi (SNA) XV Banjarmasin, 2004*(32), 1-23.
- Ratnasari, A. Y. U. D. (2016). *Daerah Wajib Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Provinsi di Indonesia Periode 2012-2014)*. 1-25.
- Setyaningrum, D., & Syafitri, F. (2012). Analisis Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 9(2), 154-170. <https://doi.org/10.21002/jaki.2012.10>
- Suhardjanto, D., & Yulianingtyas, R. R. (2011). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kepatuhan Pengungkapan Wajib Dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Kabupaten/Kota di Indonesia). *Jurnal Akuntansi Dan Auditing*, 8(1), 30-42. <https://doi.org/10.14710/JAA.8.1.30-42>
- Uliarta, H. A., Christophorus, S., & Kurniawan, H. (2018). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Di Seluruh Provinsi Indonesia. *Modus*, 30(1), 54-70. <https://doi.org/10.24002/MODUS.V30I1.1587>